

# Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Viony Monica Ratu<sup>1</sup>, Stephanus Andi Adityaputra<sup>2\*</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta

Email: [vionymonicar22@gmail.com](mailto:vionymonicar22@gmail.com)<sup>1</sup>, [andiiadityaa@gmail.com](mailto:andiiadityaa@gmail.com)<sup>2\*</sup>

Alamat: Jl. Gagak Rimang No.2, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55222

Korespondensi E-mail: [andiiadityaa@gmail.com](mailto:andiiadityaa@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to analyze the financial performance of the Bogor City Government through the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the 2019-2023 period. The method used is quantitative descriptive analysis with secondary data obtained from the Bogor City Government website, namely <https://ppid.kotabogor.go.id>. The analysis was carried out based on the calculation of seven ratios, namely the ratio of independence, dependency, effectiveness of Original Regional Income (PAD), efficiency, income growth, income budget variance, and degree of decentralization. The research results show that the financial independence of the City of Bogor is in the medium category, with high dependence on income from outside the region. The effectiveness of PAD shows very good performance, although the efficiency of budget management still requires improvement. Revenue growth shows a positive trend, and budget variance reflects fairly good management. In addition, the degree of decentralization reflects the ability of local governments to make decisions that are responsive to community needs.

**Keywords:** Financial Performance, Budget Realization, APBD.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2019-2023. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari website Pemerintah Kota Bogor, yaitu <https://ppid.kotabogor.go.id>. Analisis dilakukan berdasarkan perhitungan tujuh rasio, yaitu rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, pertumbuhan pendapatan, varians anggaran pendapatan, dan derajat desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kota Bogor berada dalam kategori sedang, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan luar daerah. Efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun efisiensi pengelolaan anggaran masih memerlukan perbaikan. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren positif, dan varians anggaran menggambarkan pengelolaan yang cukup baik. Selain itu, derajat desentralisasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Realisasi Anggaran, APBD.

## 1. PENDAHULUAN

Realisasi adalah langkah yang perlu dilakukan agar sesuatu menjadi nyata, serta pelaksanaan yang konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan. Realisasi anggaran adalah tahap pelaksanaan dari semua rencana dan alokasi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik (Assidiqi, 2016). Tujuan dari realisasi anggaran adalah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Realisasi anggaran merupakan tahap implementasi dari perencanaan anggaran yang dilakukan sebelumnya, setiap pengeluaran dalam realisasi

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada masyarakat agar penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah menetapkan sasaran kinerja untuk setiap pendapatan dan belanja daerah, baik di tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun untuk program dan kegiatan tertentu. Pendapatan daerah seharusnya sesuai dengan seluruh anggaran yang telah ditetapkan agar pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang optimal, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan layanan publik, infrastruktur, dan pembangunan daerah secara efektif. Di sisi lain, belanja seharusnya tidak direalisasikan seluruh anggaran, karena hal ini dapat mengindikasikan adanya pemborosan atau penggunaan dana yang tidak efisien. Dengan tidak menghabiskan seluruh anggaran, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sisa dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak atau untuk cadangan di masa depan, sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran yang baik menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Ketika pendapatan lebih tinggi dan belanja lebih rendah, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Hal ini juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, harapan akan kondisi kinerja ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan pemerintah daerah dalam jangka panjang.

DPRD Kota Bogor telah secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 21 November 2022. Berdasarkan persetujuan dari semua anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD 2023 menunjukkan peningkatan sebesar Rp500 miliar dibandingkan tahun lalu. Ketua DPRD Atang Trisnanto, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh tambahan biaya transfer daerah dan penetapan yang lebih cepat dari target yang telah ditentukan pada 30 November.

Atang menekankan bahwa kenaikan APBD ini menjadi sinyal positif untuk Pemerintah Kota Bogor, yang diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mengatasi berbagai masalah mendasar masyarakat. APBD 2023 juga merupakan anggaran terakhir bagi Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie Rachim, yang

akan difokuskan pada penyelesaian visi dan misi pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Dalam kerangka RPJMD, terdapat tiga misi utama yang harus dicapai: Kota Bogor Sehat, Kota Bogor Cerdas, dan Kota Bogor Sejahtera. Atang mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti belum meratanya akses BPJS, kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta kebutuhan akan sekolah negeri yang memadai. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan juga menjadi perhatian utama.

DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2023, termasuk penyelesaian Masjid Agung dan permasalahan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan target pendapatan mencapai Rp3,08 triliun, yang terdiri dari pendapatan transfer daerah sebesar Rp1,5 triliun, pendapatan asli daerah Rp1,3 triliun, dan pembiayaan daerah Rp280 miliar, seluruh pendapatan ini direncanakan untuk membiayai belanja daerah yang besarnya setara. Secara keseluruhan, penetapan APBD 2023 diharapkan dapat mendorong pencapaian target pembangunan yang lebih baik dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, sehingga Kota Bogor dapat menjadi kota yang lebih baik dan ramah keluarga.

Laporan realisasi anggaran daerah memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Hasiara (2009), pendapatan daerah mencakup semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Belanja daerah merujuk pada semua pengeluaran kas yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu, yang dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, yang juga dikelompokkan menjadi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Alfiani et al. (2024), dalam studi "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017-2022". Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif, dengan rata-rata 115,43%. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang efisien, dengan rata-rata 61,47%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 7,50%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 39,98%, sedangkan rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi, mencapai 54,35%.

Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan partisipatif, dengan rata-rata 73,63%, yang menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Faisal (2024), dalam studi “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018-2023”. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang sangat efektif, dengan rata-rata mencapai 103%. Sementara itu, rasio efisiensi dinyatakan cukup efisien dengan rata-rata sebesar 94%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 7%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 57%, dan rasio ketergantungan menunjukkan tingkat yang tinggi, mencapai 47,55%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan delegatif, dengan hasil rata-rata 137%, yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dalam mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Syukri et al. (2022), dalam studi “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020”. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efektif dengan rata-rata mencapai 92,23%. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan rata-rata sebesar 12,28%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 12,56%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi dinyatakan kurang dengan nilai rata-rata 13,48%, sedangkan rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi mencapai 84,50%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan instruktif dengan rata-rata 16,41%, yang menunjukkan perlunya arahan yang lebih jelas dalam meningkatkan kemandirian finansial daerah.

Pentingnya analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaan pendapatan dan belanja oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini sangat penting mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Analisis kinerja APBD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Bogor dipilih sebagai objek penelitian karena kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat, dengan pertumbuhan penduduk yang

signifikan dan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, yang mempengaruhi kebutuhan layanan publik dan alokasi anggaran. Kota Bogor memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang menjadi sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2019–2023, Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan menganalisis realisasi anggaran selama periode ini, dapat dievaluasi bagaimana Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan strategi keuangannya untuk menghadapi tantangan yang ada, serta bagaimana respons kebijakan anggaran tersebut terhadap kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Pemerintah Kota Bogor, maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023”.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pemerintah Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, pemerintah daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menekankan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan struktur pemerintahan yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anangkota, 2017). Pemerintah daerah merupakan lembaga

yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik di suatu wilayah tertentu (Sugiyono, 2018).

### **1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian laporan yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan kinerja keuangan dalam periode tertentu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan keadaan keuangan selama periode tertentu (Mahmudi, 2019). Selain itu, laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan (Kemenkeu RI, 2020).

### **2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 65 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pendapatan serta belanja daerah. APBD berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan layanan publik secara efisien dan efektif. Dokumen ini juga mencerminkan prioritas program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2018).

### **3) Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta melakukan perbandingan dengan anggaran yang telah ditentukan (Mahmudi, 2019). Laporan ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah (Sugiyono, 2018).

## **3. METODE PENELITIAN**

Objek dari penelitian ini adalah Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan data berupa Laporan Realisasi Anggaran periode 2019-2023. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis deskriptif dengan data kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor melalui penggunaan Rasio Kinerja Keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**1) Rasio Kemandirian**

Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan dari pihak luar, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi (Amin, 2015). Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Kemandirian =	Pendapatan Asli Daerah	x 100%
	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	

**Tabel 1** Skala Interval Rasio Kemandirian

Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah	Instruktif
25% - 50%	Cukup	Konsultif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2012)

**2) Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Ketergantungan =	Pendapatan Transfer	x 100%
	Total Pendapatan Daerah	

**Tabel 2** Skala Interval Rasio Ketergantungan

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat rendah
10% - 20%	Rendah
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
> 50%	Sangat tinggi

*Sumber: (Banga, 2017)*

### 3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Miharja et al., 2020). Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Efektivitas PAD =	Realisasi Penerimaan PAD	x 100%
	Anggaran Penerimaan PAD	

**Tabel 3** Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

*Sumber: (Mahmudi, 2019)*

### 4) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi atau perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah. Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Efisiensi =	Realisasi Belanja	x 100%
	Realisasi Pendapatan	

**Tabel 4** Skala Interval Rasio Efisiensi

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Cukup efisien
80% - 90%	Kurang efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat efisien

*Sumber: (Mahmudi, 2019)*

### 5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya perbaikan atau perkembangan, yang bermanfaat untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif selama tahun anggaran berjalan (Rahayu et al., 2019). Analisis pertumbuhan pendapatan umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan, baik berupa peningkatan maupun penurunan kinerja selama periode tertentu. Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Pertumbuhan Pendapatan	=	Pendapatan Th t – Pendapatan Th (t-1)	x 100%
		Pendapatan Th (t-1)	

**6) Rasio Varians Anggaran Pendapatan**

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2019). Pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik jika mampu mengumpulkan pendapatan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah anggaran, kinerjanya dinilai kurang memuaskan (Ramadani, 2016). Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Varians Pendapatan	=	Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan
--------------------	---	--

**7) Rasio Derajat Desentralisasi**

Rasio derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan (Rahayu et al., 2019). Rasio ini mencerminkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Berikut rumus yang digunakan (Mahmudi, 2019):

Derajat Desentralisasi =	Pendapatan Asli Daerah	x 100%
	Total Pendapatan Daerah	

**Tabel 5** Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup
30% - 40%	Sedang
40% - 50%	Baik

*Sumber: (Pasaribu et al., 2021)*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1) Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 6.** Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2019	1.015.884.216.919,86	1.455.644.350.874,00	69,79	Sedang	Partisipatif
2020	872.017.242.152,12	1.415.498.666.396,00	61,60	Sedang	Partisipatif
2021	1.075.240.926.213,11	1.463.000.794.326,00	73,50	Sedang	Partisipatif
2022	1.147.623.045.708,92	1.639.426.533.844,00	70,00	Sedang	Partisipatif
2023	1.338.618.268.168,80	1.628.857.302.371,00	82,18	Tinggi	Delegatif
<b>Rata-Rata</b>			<b>71,41</b>	<b>Sedang</b>	<b>Partisipatif</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "sedang" dengan rasio rata-rata mencapai 71,41%. Kriteria "sedang" menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Bogor dalam mengelola urusan pemerintah dan keuangan daerah masih dalam tahap yang cukup, namun belum sepenuhnya mandiri. Pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah "partisipatif", yang berarti ada keterlibatan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, namun dengan kecenderungan daerah semakin mampu untuk berinisiatif dan mengelola berbagai hal secara lebih mandiri.

Tingkat kemandirian terendah tercatat sebesar 61,60% pada tahun 2020 dengan kriteria "sedang" dan pola hubungan "partisipatif", yang disebabkan oleh dampak besar dari pandemi COVID-19. Krisis kesehatan global tersebut mengganggu

sektor ekonomi dan pemerintahan, mengakibatkan daerah Kota Bogor kesulitan dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri. Namun, pada tahun 2023, tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan signifikan mencapai 82,18% dengan kriteria "tinggi" dan pola hubungan "delegatif". Hal ini dapat diartikan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi setelah pandemi, di mana daerah mulai berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki pengelolaan keuangan.

## 2) Ketergantungan Keuangan Daerah

**Tabel 7** Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.455.644.350.874,00	2.559.857.207.793,86	56,86	Sangat tinggi
2020	1.415.498.666.396,00	2.428.579.503.649,12	58,29	Sangat tinggi
2021	1.463.000.794.326,00	2.644.780.935.777,11	55,32	Sangat tinggi
2022	1.639.426.533.844,00	2.787.105.058.802,92	58,82	Sangat tinggi
2023	1.628.857.302.371,00	2.967.475.570.539,80	54,89	Sangat tinggi
<b>Rata-Rata</b>			<b>56,84</b>	<b>Sangat tinggi</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "sangat tinggi" dengan rata-rata rasio mencapai 56,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung pada sumber pendapatan dari luar daerah. Dalam periode lima tahun terakhir, ketergantungan ini terlihat jelas, mencerminkan bahwa pendapatan daerah sebagian besar berasal dari transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih banyak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dapat menjadi tantangan dalam pembangunan daerah karena membuat anggaran daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Bogor untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, sehingga dapat mencapai kemandirian keuangan dan meningkatkan daya saing daerah.

## 3) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 8** Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.015.884.216.919,86	972.607.288.978,00	104,45	Sangat efektif
2020	872.017.242.152,12	741.531.123.201,00	117,60	Sangat efektif
2021	1.075.240.926.213,11	914.550.650.320,00	117,57	Sangat efektif

2022	1.147.623.045.708,92	1.150.887.225.486,00	99,72	Cukup efektif
2023	1.338.618.268.168,80	1.403.260.832.834,00	95,39	Cukup efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>106,95</b>	<b>Sangat efektif</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kriteria yang "sangat efektif" dengan rata-rata rasio mencapai 106,95%. Hal ini menandakan pemerintah daerah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan asli dalam mendukung pembangunan pelayanan publik. Tahun 2020 mencatat rasio efektivitas tertinggi mencapai 117,60%. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat penyesuaian target dimasa pandemi.

Di sisi lain, rasio efektivitas terendah tercatat pada tahun 2023 mencapai 95,39%. Meskipun tergolong "sangat efektif", penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan PAD, yang mungkin disebabkan faktor-faktor seperti penurunan ekonomi, perubahan kebijakan, atau dampak dari situasi eksternal lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam rasio efektivitas PAD, Pemerintah Kota Bogor tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio efektivitas di masa depan.

#### 4) Efisiensi Keuangan Daerah

**Tabel 9** Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	2.526.504.949.919,19	2.559.857.207.793,86	98,70	Cukup efisien
2020	2.353.736.171.982,00	2.428.579.503.649,12	96,92	Cukup efisien
2021	2.636.065.820.905,00	2.644.780.935.777,11	99,67	Cukup efisien
2022	2.984.193.683.003,00	2.787.105.058.802,92	107,07	Tidak efisien
2023	3.027.354.930.109,00	2.967.475.570.539,80	102,02	Tidak efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>100,88</b>	<b>Tidak efisien</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efisiensi daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata rasio mencapai 100,88%, yang dikategorikan sebagai "tidak efisien". Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah hampir mencapai titik efisiensi, masih terdapat ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Selama empat tahun terakhir, adanya peningkatan belanja daerah yang lebih cepat daripada peningkatan

pendapatan. Meskipun pendapatan daerah meningkat, kenaikannya tidak cukup untuk mengimbangi laju kenaikan belanja.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan pengelolaan anggaran agar belanja lebih sejalan dengan pendapatan daerah. Tanpa perbaikan, hal ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan keuangan daerah dan pelayanan publik. Diharapkan Pemerintah Kota Bogor dapat mengembangkan strategi efektif untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan dan mengurangi belanja, sehingga menciptakan efisiensi anggaran, dan meningkatkan rasio efisiensi ke kategori "sangat efisien" di masa mendatang.

## 5) Pertumbuhan Pendapatan

**Tabel 10** Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan pada tahun t (Rp)	Pendapatan pada tahun t-1 (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	2.559.857.207.793,86	2.328.703.432.668,85	9,93	Positif
2020	2.428.579.503.649,12	2.559.857.207.793,86	-5,13	Negatif
2021	2.644.780.935.777,11	2.428.579.503.649,12	8,90	Positif
2022	2.787.105.058.802,92	2.644.780.935.777,11	5,38	Positif
2023	2.967.475.570.539,80	2.787.105.058.802,92	6,47	Positif
<b>Rata-Rata</b>			<b>5,11</b>	<b>Positif</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 termasuk dalam kategori "positif" dengan rata-rata rasio mencapai 5,11%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tersebut mengalami peningkatan yang baik selama periode tersebut. Namun, meskipun hasilnya positif, Pemerintah Kota Bogor perlu terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan pertumbuhan pendapatan tetap positif, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pertumbuhan pendapatan Kota Bogor menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pemerintah Kota Bogor mengalami pertumbuhan pendapatan negatif yaitu -5,13%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Sebaliknya, tahun 2021 pertumbuhan pendapatan tertinggi mencapai 8,90%. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah periode sulit sebelumnya, di mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan

kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan seperti peningkatan pemungutan pajak.

## 6) Varians Anggaran Pendapatan

**Tabel 11** Analisis Varians Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Selisih	Rasio (%)
2019	2.559.857.207.793,86	2.639.970.560.688,00	- 80.113.352.894,14	96,97
2020	2.428.579.503.649,12	2.362.959.267.805,00	65.620.235.844,12	102,78
2021	2.644.780.935.777,11	2.482.148.757.721,00	162.632.178.056,11	106,55
2022	2.787.105.058.802,92	2.824.140.344.471,00	- 37.035.285.668,08	98,69
2023	2.967.475.570.539,80	3.059.704.221.734,00	- 92.228.651.194,20	96,99
<b>Rata-Rata</b>			<b>3.775.024.828,76</b>	<b>100,39</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, varians anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata sebesar Rp3.775.024.828,20, dengan rasio mencapai 100,39%. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pendapatan hampir sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor mampu mengelola pendapatan dengan baik, rasio tersebut mencerminkan usaha dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang relatif efektif.

Selisih tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar Rp162.632.178.056,11 dengan rasio mencapai 106,55%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kenaikan target anggaran yang relatif kecil dari tahun sebelumnya yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan selama fase awal pemulihan pasca-pandemi. Sebaliknya, pada tahun 2022 mencatat selisih negatif sebesar -Rp37.035.285.668,08 dengan rasio mencapai 98,69% yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan berada sedikit dibawah target anggaran. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan target yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menunjukkan sikap optimis dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

## 7) Derajat Desentralisasi

**Tabel 12** Analisis Derajat Desentralisasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.015.884.216.919,86	2.559.857.207.793,86	39,69	Sedang
2020	872.017.242.152,12	2.428.579.503.649,12	35,91	Sedang
2021	1.075.240.926.213,11	2.644.780.935.777,11	40,66	Baik

2022	1.147.623.045.708,92	2.787.105.058.802,92	41,18	Baik
2023	1.338.618.268.168,80	2.967.475.570.539,80	45,11	Baik
<b>Rata-Rata</b>			<b>40,51</b>	<b>Baik</b>

*Sumber: Data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "baik" dengan rasio mencapai 40,51%. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berhasil menerapkan prinsip desentralisasi secara efektif yang memungkinkan pengelolaan lebih otonom dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih cepat dan tepat berkat tingkat desentralisasi yang baik.

Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu mengelola tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik. Rasio derajat desentralisasi yang stabil dan positif menjadi indikator penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah. Langkah strategis perlu terus diambil untuk mempertahankan bahkan meningkatkan derajat desentralisasi sehingga dapat lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kriteria "sedang" dengan rata-rata 71,41% yang menandakan bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan meskipun mengalami kemajuan. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi mencapai 56,84% pada sumber pendapatan luar daerah. Sementara itu, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif yaitu mencapai 106,95% yang mencerminkan adanya keberhasilan dalam memaksimalkan sumber pendapatan meskipun rasio efisiensi berada pada angka 100,88% sehingga hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran. Pertumbuhan pendapatan yang positif mencapai 5,11% dan varians anggaran yang mencapai 100,39% menunjukkan pengelolaan yang cukup baik. Derajat desentralisasi yang mencapai 40,51%

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74–87.
- Amin, N. (2015). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(1), 80–91.
- Anangkota, M. (2017). Klasifikasi sistem pemerintahan (perspektif pemerintahan modern kekinian). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 148–152.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008–2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Banga, W. (2017). *Administrasi keuangan negara dan daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal, F. (2024). Analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018–2023. *Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan*, 1–9.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi ke-4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasiara, L. O. (2009). *Akuntansi sektor publik: Teori & praktik, bernuansa berperilaku*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Megaropolitan Antara. (2024, Oktober 22). DPRD Kota Bogor tetapkan APBD 2023, anggaran difokuskan tuntaskan RPJMD.

<https://megapolitan.antaranews.com/berita/221697/dprd-kota-bogor-tetapkan-apbd-2023-anggaran-difokuskan-tuntaskan-rpjmd>

- Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 148–161.
- Pasaribu, E., Septriani, S., Benardin, B., & Febriani, R. E. (2021). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan derajat desentralisasi fiskal. *Jurnal Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2008).
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Ramadani, R. F. (2016). Analisis kinerja anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Ekonomia*, 5(3), 327–345.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukri, M., Pahmi, S., & Suandi, S. (2022). Analisis kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 1–7.